



**Judul** : Saatnya Mencermati Caleg  
**Tanggal** : Senin, 06 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## T A J U K R E N C A N A

### Saatnya Mencermati Caleg



omisi Pemilihan Umum telah menetapkan calon tetap anggota legislatif untuk Pemilu 2024. Saatnya mulai mencermati mereka lebih detail agar tak salah pilih.

Sebanyak 9.917 calon anggota legislatif atau caleg akan memperebutkan 580 kursi Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu mendatang. Ini berarti, setiap kursi DPR diperebutkan 17,1 caleg. Secara kuantitas, kontestasi itu bakal lebih ketat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2019, ada 7.968 caleg yang memperebutkan 575 kursi DPR atau setiap 13,86 caleg memperebutkan satu kursi. Adapun di Pemilu 2014, 560 kursi DPR diperebutkan 6.608 caleg atau tiap kursi diperebutkan 11,8 caleg.

Jika perebutan kursi DPR semakin ketat, hal sebaliknya terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada 668 caleg yang bersaing memperebutkan 152 kursi DPD di pemilu mendatang, atau tiap kursi DPD diperebutkan 4,4 orang. Pada Pemilu 2019, sebanyak 807 caleg memperebutkan 136 kursi DPD (tiap kursi diperebutkan 5,9 caleg) dan pada Pemilu 2014 ada 945 caleg yang memperebutkan 132 kursi atau tiap kursi diperebutkan 7,16 caleg.

Makin sedikitnya caleg yang memperebutkan kursi DPD ini perlu dikaji mendalam. Kajian ini tentunya juga terkait bagaimana menjaga eksistensi lembaga DPD yang merupakan bagian dari produk reformasi 1998.

Di sisi lain, semakin ketatnya perebutan kursi DPR dapat mengindikasikan tetap dan bahkan makin menariknya posisi di lembaga itu, baik dalam bidang pengawasan, legislasi, maupun penyusunan anggaran negara. Saat ini, hampir semua seleksi untuk menjadi pimpinan lembaga negara, kecuali seperti untuk menjadi presiden, wakil presiden, dan anggota DPD, adalah melalui DPR.

Di saat yang sama, DPR semestinya juga menjadi lembaga negara yang anggotanya banyak berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Adalah bagian tugas mereka untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Terkait hal itu, penting untuk memastikan caleg yang kelak terpilih menjadi anggota DPR dan juga DPD adalah yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara berintegritas. Pemilu menjadi momentum untuk mengevaluasi kerja para wakil rakyat tersebut. Mereka yang selama ini kinerjanya banyak dikeluhkan atau berkasus sudah sepatutnya tak dipilih kembali. Di saat yang sama, caleg baru yang tak punya rekam jejak yang jelas juga jangan dipilih.

Terkait hal itu, keberanian para caleg dan juga partai politik untuk membuka rekam jejak para calegnya kepada publik menjadi penting. Saat ini, masih ada caleg dan parpol yang belum melakukannya dan hal itu patut menjadi bagian pertimbangan untuk memilih mereka pada pemilu mendatang.

Sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024 memberi peluang bagi pemilih untuk mencoblos caleg yang benar-benar dikehendaki. Sistem itu juga memungkinkan caleg dengan nomor urut bawah untuk terpilih, asalkan punya cukup suara. Maka, ini saatnya untuk lebih serius mencermati para caleg itu agar kelak kita tak salah memilih wakil kita.